EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM LAPORAN BENDAHARA INSTANSI (SILABI) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

FROLAWATI NGGULE
NIM. D02416058

PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM LAPORAN BENDAHARA INSTANSI (SILABI) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

Frolawati Nggule[1], Muh. Firyal Akbar[2], Nur Eng Mokodompit[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : frolawati@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain information about the effectiveness of the application of the treasurer report system agency (SILABI) in the environment of the Gorontalo Province residential development area. The research method uses descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with a number of informants and observations and recording secondary data related to the research problem. The results of the study concluded that the application of the agency treasury report system (SILABI) within the working area of the Gorontalo Province residential development area was not optimal due to the network in the application of this system which was not yet stable so that there were often delays in reporting, in addition to the ineffective management due to the available resources who do not understand and are familiar with the SILABI system.

Keywords: *Effectiveness; SILABI; Services*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai gambaran efektivitas aplikasi sistem laporan bendahara instansi (SILABI) di lingkungan satuan kerja pengembangan kawasan pemukiman Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi sistem laporan bendahara instansi (SILABI) di lingkungan satuan kerja pengembangan kawasan pemukiman Provinsi Gorontalo belum maksimal disebabkan oleh jaringan dalam penerapan system ini belum stabil sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan, selain itu pengelolaan yang belum efektif dikareanakan sumber daya yang tersedia yang belum faham dan familiar dengan system SILABI tersebut.

Kata kunci: Efektivitas; SILABI; Pelayanan

PENDAHULUAN

Sektor publik di Indonesia, khususnya organisasi pemerintahan terutama pemerintahan daerah, sedang mengalami satu periode waktu yang menuntut adanya perubahan yang cukup cepat dan signifikan. Oleh karena itu kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output dan outcome. Tujuan pengukuran *value for money* yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber dayadan hasil yang maksimal, serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat terintegarasi secara transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan kinerja sektor publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan Unit Organisasi, Menteri, Pimpinan Lembaga, dan selanjutnya laporan kinerja tingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara atau lembaga yang telah disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis.

Informasi yang tersedia dalam laporan instansi dapat digunakan sebagai bahan peningkatan/perbaikan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sistem pelaporan yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Nasir & Oktari, 2011).

Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan teknologi untuk mengontrol kinerja melalui aplikasi yang dibuat dalam bentuk program. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat *(public services)*, pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan.

Melihat situasi aktual saat ini, laporan keuangan pemerintah beberapa tahun belakangan ini banyak instansi baik di level kementrian maupun di tingkat kabupaten/kota mendapat opini wajar tanpa pengecualian/unqualified opinion dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menandakan laporan keuangan pemerintah secara menyeluruh sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Akan tetapi laporan tersebut tidak bisa disimpulkan bebas dari korupsi atau fraud. Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat ini) menyatakan bahwa aneka bentuk kecurangan dalam penggunaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara baru akan tampak jika BPK mengadakan audit khusus. Karena laporan keuangan yang diaudit BPK itu tidak secara komprehensif. Akan tetapi, audit yang dilakukan hanya menilai kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan dan sistem pengendalian internal.

Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang penting karena merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (Yulianti, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2016, yang merupakan updating dari Peraturan Menteri PAN RB sebelumnya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebenarnya merupakan adopsi dari penerapan Manajemen Kinerja (Performance Management) yang biasanya diterapkan di sektor swasta, namun karena Objeknya adalah Instansi Pemerintah maka dimodifikasi menjadi SAKIP. Namun pada akhirnya, tujuannya sama yaitu bagaimana agar Instansi bisa meningkatkan performa dan lebih berorientasi hasil (result-oriented). Siklusnya pun tidak jauh berbeda, mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Monitoring, dari keempat siklus itu, LAKIP hanya salah satu bagian dari objek evaluasi yaitu di pelaporan kinerja.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan Nilai Akuntabilitas Kinerja tiap-tiap Instansi pemerintah, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi, yaitu mencerminkan sejauh mana kemampuan Instansi tersebut dapat mempertanggungjawabkan hasil (result/outcome) yang diperoleh atas penggunaan uang negara.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.Selanjutnya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (K/L). K/L melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan keuangan.

SAI merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkupK/L yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan SAI diperlukan unsur-unsur sebagai berikut, Dokumen sumber/formulir; Jurnal; Buku besar; Buku pembantu; dan Laporan.SAI akan berjalan dengan baik, apabila dalam suatu organisasi selaku unit yang melaksanakan proses akuntansi dan sekaligus membutuhan informasi yang dihasilkan, dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh UnitAkuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan alasan tersebut maka untuk melaksanakan SAI, K/Lharus membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik.

Pelaporan keuangan ini tentu sangat berhubungan dengan keberadaan Bendahara dalam organisasi karena merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Negara untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Bendahara berperan dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban adalah menyelenggarakan pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) adalah alat (*tool)* yang ditunggu-tunggu oleh bendahara untuk mempermudah pelaksanaan salah satu tugasnya.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER 03/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh kementerian Keuangan cq.Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan merilis sebuah aplikasi pembukuan bendahara yangdiberi nama Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI). Sebenarnya alur pengoperasian aplikasi SILABI ini sama dengan alur pada pembukuan secara manual. Tapi karena masih baru dan banyak bendahara satker yang belum familiar dengan aplikasi SILABI ini, banyak bendahara yang mengeluhkan kesulitan dalam pengoperasian aplikasi SILABI.

Penggunaan Aplikasi SILABI akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia paling lambat untuk LPJ Bendahara Bulan Juli 2014 (penyampaian LPJ ke KPPN Bulan Agustus 2014) dan bagi satker yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanks i sebagaimana diatur dalam PMK 162/PMK.05/2013.

Bendahara pengeluaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga menyelenggaran catatan pembukuannya

sebagaian besar dilakukan dengan cara manual (belum berbasis database) walaupun dilakukan dengan komputer dengan system komputerisasi secara otomatis. Hal tersebut sangat mereporkan tugas bendahara yang dituntut harus cepat, tepat dan akurat serta transparan dalam pelaporannya. Oleh karena itu hadirnya aplikasi SILABI sebagai Aplikasi Pembukuan Bendahara menjadi harapan besar bagi bendahara untuk mempermudah pelaksanaan tugas penatausahaan danpertanggungjawaban keuangan.

Menarik untuk melihat efektivitas dari aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontaloyang dalam lima tahun telah menggunakan aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) namun dari hasil observasi awal penulis diketahui bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam operasional SILABI ini diantaranya aplikasi silabi masih mengalami kegagalan sistem utamanya dalam hal penyimpanan data mesti sistem tersebut selalu diupdate.

Jaringan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang kadang tidak stabil yang mana jaringannya dari pusat, sedangkan SPAN diperlukan untuk melihat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah terbit sebagai syarat dana bisa dicairkan pada bank. Batas pemasukan pada tanggal 1-10 jika pejabat Satuan Kerja di Kantor Pelaksanaan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan pejabatnya tidak berada di tempat maka akan berimplikasi pada pencairan dana pada bendahara.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya misalnya yang pertama penelitian yang dilakukan Mulalinda, & Tangkuman, (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irfianto, (2013). Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Kabupaten Gresik. Penelitian ketiga yang diulakukan oleh Astuti, I. D. (2015). Efektivitas Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (Silabi) Yang Digunakan Bendahara Pengeluaran Dana Pemerintah Di Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada .

Dari beberapa penelitian tersebut terkait mengenai laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi sam dengan penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak kepada lokus, metode dan konsep/teori yang digunnakan untuk memgukur tingkat efektivitas pelaksanaan beberapa penggunaan aplikasi tersebut. Sehingganya penelitian ini diharapkan melahirkan hasil penelitian yang bisa menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pelaporan keuangan berbasis aplikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena tujuannya mengungkapkan dan menggambarkan

fakta-fakta mengenai efektivitas aplikasi sistem laporan bendahara instansi (SILABI) di lingkungan satuan kerja pengembangan kawasan pemukiman Provinsi Gorontalo .

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari beberapa orang yang menjadi informan dan Key Informan yakni Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo; Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo; Bendahara Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Gorontalo PPSPM; Penata Keuangan Pengembangan Kawasan Pemukiman; Staff Keuangan yang semuanya berjumlah 8 orang. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian seperti artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Menampilkan Data (*Data Display*) dan Verifikasi data (*Data Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya SILABI merupakan Sistem Laporan Bendahara Instansi adalah aplikasi pembukuan bendahara yang baru dipublikasikan oleh dirjen perbendaharaan untuk membantu bendahara dalam membuat pembukuan yang terdiri dari BKU dan beberapa buku pembantunya serta LPJ bendahara pengeluaran (termasuk juga sesungguhnya bendahara penerimaan).

Sebagian besar Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian/ Lembaga masih menyelenggarakan catatan pembukuannya dengan cara manual (belum berbasis database). Hal tersebut sangat merepotkan tugas bendahara yang dituntut harus cepat, tepat waktu, akurat, serta transparan dalam pelaporannya.Berdasarkan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan aplikasi Pembukuan Bendahara yang bernama Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) untuk memudahkan tugas bendahara.

SILABI merupakan aplikasi Pembukuan Bendahara yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan tugas penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara. SILABI juga berfungsi sebagai alat kontrol antara instansi terkait dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyalur dana dari pemerintah pusat ke instansi pemerintahan terkait. Selain itu, SILABI juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan transparan. Sesuai dengan instansinya apakah membutuhkan aplikasi ini atau tidak. Peran dan fungsi dari aplikasi ini dalam era globalisasi menjadi sangat krusial dan strategis. Paradigma pengelolaanya harus efektif.
Penelitian yang dibahas adalah Efektivitas Aplikasi. Efektivitas dalam ruang lingkup sebuah organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana. Karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai.

serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antra rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Keberhasilan organisasi dapat diukur dengan bagaiaman tingkat efektivitas daripada suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokok atau mencapai semua sasarannya. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

Untuk melihat kajian ilmiah, tentang Efektivitas aplikasi sistem laporan bendahara instansi (SILABI) di lingkungan satuan kerja pengembangan kawasan pemukiman Provinsi Gorontalo, dibutuhkan suatu pendekatan teori, untuk itu teori yang digunakan oleh peneliti bersumber dari Indikator Efektivitas Menurut Kumorotomo (1996) untuk melihat efektivitas suatu program, dapat dilihat melalui 4 indikator yaitu : Efesiensi, Tujuan, Keadilan dan Daya Tanggap yang diuraikan berdasarkan dalam hasil penelitian dan disimpulkan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Efesiensi

Efesiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan aplikasi SILABI yang berdasarkan sumber daya yang diinginkan oleh suatu organisasi tertenu. Aplikasi dikatakan efesien jika ada perbaikan pada prosesnya, contoh aplikasi ini menjadi lebih mudah dan dibutuhkan atau lebih murah. Aplikasi

SILABI akan lebih efesien apabila rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan itu bisa dibandingkan artinya ada perbandingan antara input dan output. Aplikasi SILABI harus bisa berhasil guna artinya harus memiliki kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat,berkualitas dengan tingkat sekecil mungkin.

Sesuai dengan kesimpulan hasil wawancara pada hasil penelitian bahwa Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) efesien karena memmudahkan dalam pelaporan keuangan tapi belum maksimal jika jaringan atau frekuensi yang tidak sesuai dengan harapan pengguna, karena keterlambatan dalam membayar tagihan mengakibatkan jaringanpun sulit di akses sehingga pekerjaan terhambat. Kemudian menurut observasi peneliti dilapangan bahwa aplikasi ini belum efesien dalam hal Persoalan sistem yang belum optimal dalam hal penyimpanan data dan permintaan update pada sistem. Maka dari itu pihak terkait harus merumuskan kembali apakah aplikasi ini memang cocok untuk diterapkan di setiap instansi atau memang hanya dibagian tertentu saja.

Kesimpulannya Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) akan efesien apabila didukung oleh beberapa aspek penunjang seperti sistem yang baik dan jaringan yang mudah untuk diakses.

2. Tujuan

Setiap organisasi memiliki tujan masing-masing, tujuan itupun menjadi dasar dan patokan suatu instansi

organisasi dalam melaukan suatu kegiatan atau program. Apabila tujuan dapat terealisasi dengan baik berarti ada tahap-tahap atau proses yang dilakukan secara benar dan terstruktur. Tujuan daripada aplikasi SILABI adalah memudahkan suatu pekerjaan bendahara atau bagian keuangan.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) selama ini telah membantu para pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya tetapi belum maksimal, karena masih ada kendala-kendala yang ditemui seperti harus mengupdate aplikasi. Jika tidak di update maka pembukuannya akan bermasalah, dan juga sistem online span yang seringkali tidak bisa di akses karena jaringan yang bermasalah ataupun sistemnya yang eror dari pusat.
Sedangkan menurut observasi peneliti dilapangan bahwa Jaringan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang kurang stabil berdampak pada proses pencairan dana. Hal tesebut berdampak pada tujuan yang kurang terealisasi artinya aplikasi ini harus seimbang dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan daripada instansi. Maka dari itu pihak terkait harus lebih giat dalam menangani hal tersebut sehingga proses tahapan daripada aplikasi ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Keadilan

Keadilan dalam hal ini berkaitan dengan sikap atau tindakan dalam hubungan antar kelompok manusia yang berisi sebuah tuntutan agar pihak-pihak terkait mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Dalam hal ini aplikasi SILABI harus bisa memberikan keuntungan terhadap suatu instansi apabila instansi tersebut bisa menggunakannya dengan baik dan benar dan disalurkan pada setiapm pihak yang membuthkannya. Aplikasi SILABI harus memberikan manfaat untuk setiap yang menggunakannya.

Sesuai kesimpulan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SILABI belum keseluruhannya didistribusikan secara merata sebab fasilitas system jaringan di masing-masing wilayah tidaklah sama, sebab tiap wilayah mempunyai letak geografis berbeda-beda mengakibatkan pendistribusiannya tidak merata. Artinya aplikasi ini harus memiliki fungsi yang tidak membuat instansi tidak memikirkan cara untuk mendapatkannya.

Diharapkan kepada pemerintah terkait, kiranya dapat memaksimalkan pendistribusian aplikasi ini dengan memulai sosialisasi disetiap intansi-instansi yang ada. memaksimalkan sosialiasi-sosialisasi bukan hanya pada akses yang dapat dijangkau akan tetapi diseluruh akses yang dioptimalkan dapat ditempuh dan memberikan dampak yang baik.

4. Daya Tanggap

Respon daripada aplikasi ini sangat ditentukan oleh pengguna, jadi aplikasi SILABI meruapakan aplikasi yang dikatakan efektif apabila respon dari pengguna baik dan paham mengenai aplikasi tersebut.

Menurut kesimpulan pada hasil wawancara bahwa para pengelola dan pengguna aplikasi SILABI secara umum dimengeri dan di pahami sebab sistem ini tidaklah sulit untuk mengoperasikan Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi SILABI

tapi tidak semua sumber daya manusia yang paham tentang aplikasi tersebbut, masih ada yang tidak bisa mengoperasikannya.

Sedangkan menurut observasi peneliti bahwa masih ada sumber daya manusia yang belum paham tentang aplikasi ini, kurangnya pengetahuan tentang mengaplikasikan komputer membuat aplikasi ini menjadi kurang daya tarik. Pegawai atau bendara keungan lebih suka dengan cara lama misalnya pakai buku kas yang harus mencatat semua pengeluaran dan pemasukan sehingga membuat pekerjaan agak lambat dan terhambat.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan indikator efektivitas berarti melihat sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana program terealisasi sesuai dengan maksud dan harapan. Berdasarkan teori yang digunakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program atau aplikasi SILABI sudah baik dimana keseluruhan aspek sudah dapat dinilai berdasarkan teori indikator efektivitas, namun belum semua berjalan dengan maksimal karena masih ada hambatan – hambatan yang ditemui. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan atau progeam publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu program atau kegiatan hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan fokus masalah yang dikemukakan bahwa Efektivitas Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan efektif hal ini ditunjukan dengan efektivitas kinerja pelayanan menurut Kumorotomo dengan menggunakan 4 Indikator yaitu, Efesien, tujuan keadilan dan daya tanggap.

Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) belum maksimal karena jaringan atau frekuensi yang tidak sesuai dengan harapan pengguna, karena keterlambatan dalam membayar tagihan mengakibatkan jaringanpun sulit di akses sehingga pekerjaan terhambat. Jika tidak di update maka pembukuannya akan bermasalah, dan juga sistem online span yang seringkali tidak bisa di akses karena jaringan yang bermasalah ataupun sistemnya yang eror dari pusat.
Aplikasi SILABI belum keseluruhannya didistribusikan secara merata sebab fasilitas system jaringan di masing-masing wilayah tidaklah sama, tiap wilayah mempunyai letak geografis berbeda-beda mengakibatkan pendistribusiannya tidak merata. Kemudian idak semua sumber daya manusia yang paham tentang aplikasi tersebbut, masih ada yang tidak bisa mengoperasikannya

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan aplikasi SILABI dengan melihat dan menekankan indikator efektivitas

kinerja pelayanan; untuk Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo, dalam memutuskan suatu program harus benar-benar diberikan pengawasan atau controlling serta evaluasi. Agar program atau kegiatan ini berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan; selanjutnya kepada instansi-intasni agar kiranya dapat berpartisipasi dan dapat memanfaatkan program pemerintah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, D., Sari, R. N., & Anggraini, L. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(2), 1-15.

Astuti, I. D. (2015). *Efektivitas Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (Silabi) Yang Digunakan Bendahara Pengeluaran Dana Pemerintah Di Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada*, (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Dwi Irfianto, S. I. S. W. O. (2013). *Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kabupaten Gresik*. Publika, 1(2).

Edi, Sutrisno. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Erni, Sule Trisnawati. (2006).*Pengantar Manajemen.* Jakarta, Kencana.

Gibson, James L. (2014). *Perilaku Organisasi (Organizational. Behavior) (Edisi-9).* Jakarta: Salemba Empat.

Gibson, James L. Dkk. (2006). *Organizations behaviour, structure, processes*. Dallas : Business Pub.

Handoko, T. H. (2014). *Manajemen, Edisi Kedua*, Cetakan Keduapuluhenam. BPFE. Yogyakarta.

Harahap, S. S. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo, Jakarta.

Hehanussa, S. J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM) (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).

Kalangi, R. (2015). *Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 2(1), 1-18.

Kumorotomo, W., & Purwanto, E. A. (2005). *Anggaran berbasis kinerja: konsep dan aplikasinya.* Diterbitkan oleh Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia.

Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(1).

Nasir, A., & Oktari, R. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar).*Jurnal Ekonomi, 19(02).

Putra, D. M. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model*. Universitas Mercu Buana.

Yulianti, R. (2015). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan).* Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1(2), 1-15.